

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisa data, penulis dapat memberikan kesimpulan terkait Analisis Komparatif Antara Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) & Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Jagakarsa Pada Tahun 2018-2021) yaitu sebagai berikut.

1. Perkembangan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa Tahun 2018-2021 berkembang dalam keadaan yang berfluktuatif. Realisasi penerimaan terendah terjadi pada tahun 2018, karena KPP Pratama Jakarta Jagakarsa resmi memisahkan diri dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Disusul dengan realisasi pada tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan di angka negatif atau minus dikarenakan faktor Pandemi Covid-19. Sedangkan, realisasi penerimaan terbesar didapatkan pada Tahun 2019, walaupun tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan serta pada tahun 2021 dan mampu mencapai target yang telah ditentukan.
2. Perkembangan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa Tahun 2018-2021 berkembang dalam keadaan yang berfluktuatif. Realisasi penerimaan terendah terjadi pada tahun 2018, karena KPP Pratama Jakarta Jagakarsa resmi memisahkan diri dari KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Selama tahun 2018-2021 yang dapat mencapai target penerimaan, yaitu terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Namun pada tahun 2021, pertumbuhan penerimaannya berada pada angka negatif atau minus dikarenakan dampak pandemi covid-19.
3. Terkait efektivitas penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh), pada tahun 2019 dan 2020 dikategorikan sebagai Efektif, dan untuk tahun 2021 dikategorikan sebagai Sangat Efektif. Sedangkan, untuk tingkat efektivitas penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pada tahun 2019 dikategorikan sebagai Efektif, dan untuk tahun 2020 dan 2021 dikategorikan sebagai Sangat Efektif.

4. Adapun faktor pendukung dalam mencapai target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), yaitu kinerja sumber daya manusia, meningkatnya jumlah wajib pajak, dan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik pasca pandemi covid-19. Sedangkan, faktor penghambat penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), yaitu menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kurangnya kesadaran & kepatuhan dari wajib pajak, dan jumlah *Account Representative (AR)* yang masih terbatas.
5. Adapun faktor pendukung dalam mencapai target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu meningkatnya tingkat konsumsi dari masyarakat, terjadinya peningkatan nilai inflasi, dan jumlah impor yang mengalami peningkatan. Sedangkan, faktor penghambat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu menurunnya aktivitas perekonomian akibat Pandemi Covid-19, dan sosial-politik yang terganggu akan mempengaruhi penerimaan pajak.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin menuliskan beberapa saran terhadap penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Komparatif Antara Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) & Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Jagakarsa Pada Tahun 2018-2021) yaitu sebagai berikut.

1. Untuk KPP Pratama Jakarta Jagakarsa, agar menambah jumlah *Account Representative (AR)* dan juga seksi pelayanan guna untuk memberikan edukasi dan juga pemahaman wajib pajak tentang pentingnya perpajakan bagi perkembangan bangsa dan pembangunan. Jumlah AR yang seimbang dengan beban kerja yang dimiliki akan membuat pekerjaan yang dimiliki menjadi lebih optimal, sehingga pencapaian target yang telah ditentukan dapat dicapai secara maksimal.
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan program kerja yang telah dilakukan sebelumnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti kunjungan ke wajib pajak, kelas pajak, penyebaran informasi melalui berbagai media massa (Sosial media, *pamphlet*, radio dan lain-lain). Dengan kemudahan dalam mendapatkan informasi akan membuat wajib pajak tidak kebingungan

dan dapat menyampaikan laporan perpajakan secara tepat dan benar. Sehingga pemahaman serta pengetahuan dari wajib pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak.

3. Mengali potensi perimaan pajak digital. KPP Pratama Jakarta Jagakarsa harus peka dan cepat tanggap terhadap perubahan zaman yang terus meningkat dalam hal tekhnologi. Tekhnologi yang terus meningkat akan membuat sebuah prospek bisnis baru, sehingga KPP Pratama Jakarta Jagakarsa harus mampu menggali potensi yang ada ini untuk meningkatkan penerimaan pajak.
4. Mengoptimalkan peran serta dari Program Relawan Pajak. Program Relawan Pajak merupakan salah satu program yang harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin karena outputnya nantinya para relawan pajak ini dapat memberikan kontribusi melalui edukasi hingga asistensi pembayaran dan pelaporan pajak kepada wajib pajak, sehingga dengan demikian akan meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Jagakarsa, karena akan semakin banyak wajib pajak yang tereduksi.
5. Mempersiapkan potensi pajak dari Konferensi G-20. Peran nyata dari isi konferensi G-20, yaitu terhadap kebijakan perpajakan, seperti G-20 telah memacu OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) mendorong pertukaran informasi terkait pajak untuk mengakhiri penghindaran pajak. Rencana yang sangat baik ini perlu persiapan yang baik pula, sehingga perlu perencanaan yang sangat serius serta langkah-langkah yang tepat agar eksekusinya sesuai dengan yang diinginkan.
6. Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat meneliti hal yang sama namun dengan variable dan subjek serta objek penelitian yang berbeda dengan penelitian ini yang juga dapat mempengaruhi penerimaan dari PPh dan PPN agar dapat didapatkan kesimpulan yang didukung dengan teori.